

OTONOMI DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Menuju Riau 2020)

Meyzi Heriyanto

Jurusan Ilmu Administrasi Niaga Universitas Riau Kampus Binawidya Pekanbaru
28293 Divisi Penerbitan dan Komunikasi Ilmiah Pusat Penelitian Industri dan
Perkotaan Universitas Riau Jl. Pattimura No. 9 Pekanbaru 28132,
Telp. 0761-20077
E-mail: Meyzi@Plasa.com

Abstrak

Kemajuan di bidang teknologi informasi membuat individu maupun organisasi semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi, sehingga menunjang efektivitas, produktivitas dan efisiensi. Dalam kerangka tersebut tulisan ini menawarkan model sistem informasi daerah (SIMDA) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pusat dan Daerah yang bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan publik. Ketika aspek kewenangan, kelembagaan dan keuangan banyak bergeser dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perlu ditopang oleh SIMDA yang *integrated* dan komprehensif agar terwujud pelayanan prima kepada masyarakat. Model SIMDA yang dirancang dilengkapi dengan *database* dan *website* yang sangat bermanfaat dalam pembuatan perencanaan di daerah Riau menuju Riau 2020, seperti Masterplan Riau 2020, rencana strategis (Renstra) Kabupaten/Kota, karena sistem ini mampu menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat, mudah di-*upgrade* serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Sistem Informasi Daerah, Database, Model SIMDA

Pendahuluan

"Kita telah menapaki zaman baru yang dicirikan oleh adanya ledakan informasi (information explosion) beserta sepuluh kecenderungan pokok yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi".

Ungkapan John Naisbitt tersebut saat ini terbukti dengan terjadinya perkembangan yang cukup menggembirakan dalam bidang teknologi informasi dan pengaruhnya pun begitu besar dalam

berbagai segi kehidupan, baik secara individual maupun organisasional. Pada level organisasi perkembangan teknologi informasi tidak hanya berpengaruh pada bidang komunikasi semata tetapi juga pada kecepatan dalam pengolahan data yang pada akhirnya mempengaruhi pelayanan publik, khususnya di era otonomi daerah.

Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah banyak dilakukan oleh kalangan praktisi dan akademisi, termasuk yang berdomisili di Riau. Maraknya kajian tersebut

urusan pemerintahan dan pembangunan yang tumpang tindih antara instansi satu dengan instansi lainnya, kurang proporsionalnya antara visi, misi dan beban kerja organisasi dengan besaran organisasi, serta kurang proporsionalnya pembagian wewenang antara organisasi ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Konsekuensi dari otonomi yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dari aspek kelembagaan akan diikuti dengan langkah-langkah antara lain; likuidasi lembaga-lembaga di daerah, baik kantor wilayah di provinsi, kantor departemen di kabupaten/kota (kecuali untuk urusan yang dipegang Pusat), perampangan struktur kelembagaan di Provinsi, seperti hilangnya beberapa struktur kedinasan, serta perampangan struktur tingkat pusat, seperti fungsi departemen teknis diganti oleh yang bersifat koordinatif dan fungsional.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka struktur kelembagaan pemerintah akan terkonsentrasi di kabupaten/kota. Pada masa transisi, dimana pemerintah pusat dihadapkan pada berbagai keterbatasan serta konflik yang cukup berat dalam menata aspek kelembagaan, disatu sisi budaya "sekan" masih tertanam, di lain pihak ada kebutuhan untuk tetap mempertahankan *status quo* dengan menciptakan institusi baru untuk menampung unit organisasi yang dihapus, dikhawatirkan akan mengesampingkan esensi demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan publik.

Aspek Keuangan

Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian

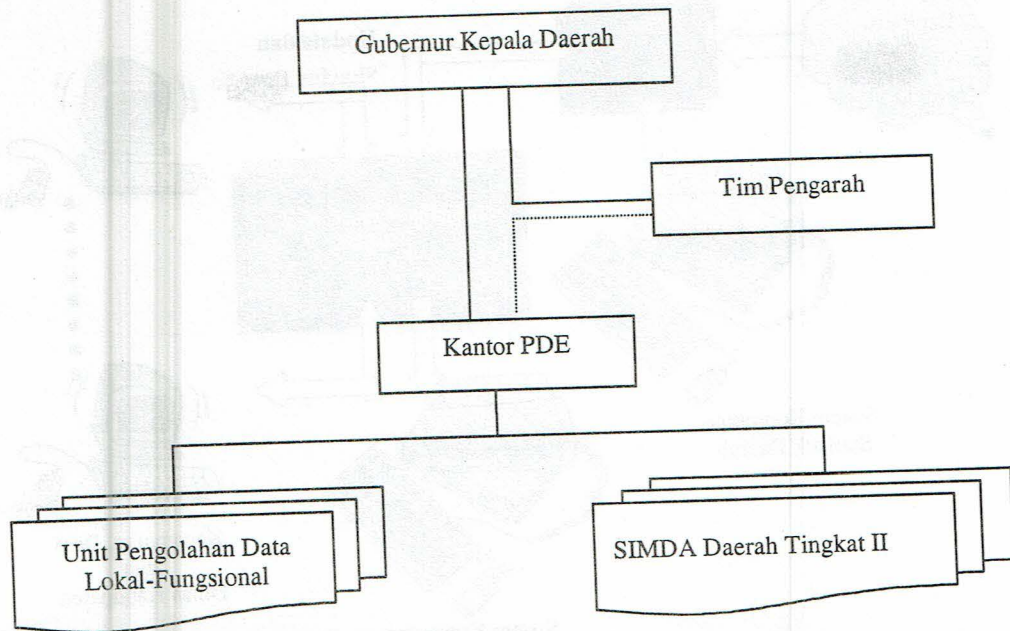
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan, pemerintah mengemban 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi alokasi (atas sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan publik), fungsi distributif (pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan) dan fungsi stabilitas (pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter).

Urgensi dari perimbangan keuangan pusat-daerah adalah; daerah lebih mampu memacu pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan antar daerah yang seimbang, pembagian dana yang rasional dan adil kepada daerah penghasil sumber utama penerimaan negara, pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, meredam ketidakpuasan daerah, meningkatkan perhatian daerah terhadap pusat dan memperkuat integrasi nasional.

Peringatan keras di atas perlu dicermati, apabila Riau ingin sukses dalam implementasi otonomi daerah dari perspektif demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan publik, mengingat daerah Riau "*plus*" dengan sumberdaya alam dan "*minus*" dengan *skill labor* dan teknologi. Salah satu bentuk teknologi yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan tulisan ini adalah teknologi dibidang informasi (*IT*).

Berdasarkan survai lapangan



Gambar 1. Model Struktur Organisasi SIMDA
Sumber: Kumorotomo, 2001

Berdasarkan tugas dan wewenang pemerintah daerah secara umum, maka dapat dikategorikan orientasi SIMDA ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Sistem informasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintah; menyangkut manajemen pengawasan, administrasi perkantoran, atau pengembangan statistik.
2. Sistem informasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan daerah; mencakup aplikasi manajemen perencanaan, manajemen potensi daerah, pertanahan serta manajemen kependudukan.
3. Sistem informasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat; meliputi tugas manajemen pendapatan daerah, kesehatan, pendidikan, perkreditan dan masalah air minum.

Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pusat dan Daerah yang bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan publik, maka tulisan ini menawarkan konsep *Otonomi Daerah berbasis Teknologi Informasi* sebagai suatu solusi yang tepat untuk menghasilkan SIMDA yang akurat dengan menggabungkan SIMDA dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam merencanakan dan mengelola perekonomian daerah. Model Sistem Informasi Daerah (SIMDA) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

cepat dan biaya murah bagi para pelaku usaha di daerah.

- c. Memudahkan aparatur daerah untuk melakukan monitoring perkembangan ekonomi di daerah.

3. Aspek Sosial;

- a. Sebagai salah satu wahana dan sarana penting proses rekayasa sosial (*social re-engineering*)
- b. Membangun sumberdaya manusia daerah yang sadar akan pentingnya teknologi informasi.

Penutup

Bergulirnya otonomi daerah mengisyaratkan adanya nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemajuan dibidang Teknologi Informasi. Otonomi daerah berbasis teknologi informasi merupakan pesan sekaligus surat terbuka yang ingin disampaikan melalui tulisan ini kepada birokrat dan pemerhati masalah Sistem Informasi Manajemen di daerah khususnya di Riau untuk direnungkan keberadaannya dalam upaya menghadapi tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

Daftar Kepustakaan

- Aminullah, E. 2000. Model Transformasi Natural dan Skenario Pelaksanaan otonomi Daerah. Makalah Seminar dan Lokakarya Otonomi Daerah. Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Juli 2000.
- Edwards, Chris. John Ward, Andy Bytheway. 2001. *The Essence of Information Systems*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Effendy, Onong Uchjana. 1996. *Sistem informasi manajemen*, Bandung, mandar Maju.
- Kumorotomo, Wahyudi, Subando Agus Margono. 2001. *Sistem informasi Manajemen dalam organisasi-organisasi publik*, Yogyakarta. Gajah mada university press.
- Naisbitt, John dan Patricia Abur-dene, 1990. *Megatrends 2000, Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an*, Binarupa Aksara. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2000. Perspektif implementasi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan paradigma baru dalam system penyelenggaraan pemerintah. Makalah Seminar dan Lokakarya Otonomi Daerah. Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Juli 2000.
- Sutanta, E. 1996. *Sistem Basis Data, Konsep dan Perannya dalam Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.